

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aset daerah adalah semua kekayaan daerah yang dimiliki maupun yang dikuasai pemerintah daerah, yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, misalnya sumbangan, hadiah, donasi, wakaf, hibah, swadaya, kewajiban pihak ketiga, dan sebagainya. Secara umum aset daerah dapat dikategorikan menjadi dua bentuk, yaitu aset keuangan dan aset nonkeuangan. Aset keuangan meliputi kas dan setara kas, piutang, serta surat berharga baik berupa investasi jangka pendek maupun jangka panjang. Aset nonkeuangan meliputi aset tetap, aset lainnya, dan persediaan.

Sementara itu jika dilihat dan penggunaannya, aset daerah dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu: 1) aset daerah yang digunakan untuk operasi pemerintah daerah (*local government used assets*), 2) aset daerah yang digunakan masyarakat dalam rangka pelayanan publik (*social used assets*), dan 3) aset daerah yang tidak digunakan untuk pemerintah maupun publik (*surplus property*). Aset daerah jenis ketiga tersebut pada dasarnya merupakan aset yang menganggur dan perlu dioptimalkan pemanfaatannya. Pemerintah memiliki berbagai macam jenis aset bangunan, salah satunya berupa fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan.

Kepastian inventarisasi aset tanah desa menjadi sangat penting dalam menentukan arahan perencanaan desa kedepannya. Tidak jelasnya keberadaan aset tanah desa dapat menyebabkan terhambatnya perencanaan dan implementasi pembangunan yang dilakukan oleh suatu desa. Inventarisasi aset tanah desa juga merupakan salah satu cara desa dalam mencegah terjadinya peralihan status kepemilikan serta pendataan maupun penyelamatan terhadap seluruh aset desa yang dimiliki (Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif, 2018).

Pendataan merupakan salah satu bagian dari proses inventarisasi aset daerah. Pendataan dalam bentuk keruangan (spasial) menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG) menjadi salah satu upaya tata kelola aset yang baik

khususnya inventarisasi. Pendekatan keruangan memungkinkan pemerintah daerah melakukan spatial analysis, baik bagi tiap-tiap objek aset maupun wilayah daerah secara keseluruhan untuk mendapatkan informasi yang cukup bagi penetapan strategi dan pengambilan keputusan pemanfaatan aset (at the current time) maupun pengembangannya di masa yang akan datang (Siregar, 2004). Sejalan dengan hal tersebut, SIG juga dapat digunakan untuk memberikan evaluasi terhadap aset daerah yang nantinya dapat ditampilkan dalam bentuk visual peta.

Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu adalah salah satu wilayah yang terkendala dalam pemetaan inventarisasi aset pemerintah. Akibatnya kesulitan dalam mengatur aset-aset tanah yang dimiliki oleh pemerintah tersebut. Tidak jelasnya aset tanah yang dimiliki pemerintah, seperti tanah desa, kepemilikan bangunan mengakibatkan sulitnya perencanaan dalam pengembangan wilayah. Salah satu lembaga atau instansi yang bergerak dalam pengukuran dan pemetaan ialah Badan Pertanahan Nasional yang dapat membantu masyarakat atau pemerintah dalam kepemilikan aset tanah yang belum jelas.

Dengan adanya penelitian ini dimaksudkan untuk membuat data aset pemerintah daerah menjadi bentuk peta sehingga mudah dalam pengelolaan. Metode penelitian yang digunakan yaitu memetakan secara digital, dimana didalamnya terdapat jumlah lahan aset milik Pemerintah Daerah yang tersebar didaerah penelitian. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggambarkan kondisi nyata di lapangan yang diwujudkan dalam bentuk peta. Hasil penelitian berupa peta persebaran lahan aset daerah berupa fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan milik Pemerintah Daerah di daerah penelitian.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka disimpulkan suatu rumusan masalah bagaimana cara melakukan pemetaan dan evaluasi terhadap aset pemerintah daerah yang berada di Kecamatan Baturaja Barat.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini melakukan inventarisasi pemetaan, menggambarkan kondisi nyata di lapangan yang diwujudkan dalam bentuk peta dan menganalisa aset pemerintah daerah yang berada di Kecamatan Baturaja Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat pada penelitian ini untuk mengetahui persebaran dan kondisi aset milik pemerintah daerah Kecamatan Baturaja Barat sehingga memudahkan perencanaan dalam pengelolaan dan pengembangan wilayah. Dan juga untuk menghindari konflik antar masyarakat dengan pihak pemerintah atas ketidakjelasan kepemilikan tanah tersebut.

1.5 Batasan Masalah

Untuk memperjelas permasalahan dan mempermudah dalam menganalisa, maka dibuat batasan masalah sebagai berikut :

- a. Studi kasus yang digunakan adalah kawasan Kabupaten Ogan Komering Ulu yaitu Kecamatan Baturaja Barat.
- b. Jenis aset yang diteliti yaitu fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan.
- c. Pengolahan data menggunakan aplikasi *ArcGIS*.